
Cultural Capital dan Kharisma Kiai dalam Wacana Partai Politik

Siti Muazaroh dan Subaidi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Naskah diterima 19 Jan 2019, direvisi 2 Feb 2019, disetujui 12 Mei 2019

Abstract *Kiyai has quite significant influence among the community despite aligning double roles as caregivers of boarding schools as well as politicians. This article examines the Maimun Zubair nanny Pondok pesantren A-Anwar Sarang and also chairman of the Sharia Assembly Party Development Association (PPP) using the analysis of the mutualist symbiotic theory of Al-Ghozali by mirroring the cultural capital theory of Bourdieu. The results of this research can be suggested that the first figure Maimun Zubair Kiyai can position his role on the structure and as an agent. Second, Maimun has a charisma in the community despite the politics of the world. With the charism still preserved and the determination of the relation in religious affairs and state should be placed in its position and in good cooperation and balanced, so as to minimize the conflict in political parties.*

Keywords: *Cultural capital, Kharisma, Kiai, political party, discourse.*

Abstrak Kiyai memiliki pengaruh cukup signifikan di kalangan masyarakat meskipun menyelaraskan peran ganda sebagai pengasuh pondok pesantren dan juga politisi. Artikel ini mengkaji K.H. Maimun Zubair pengasuh pondok pesantren A-Anwar Sarang dan juga Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan menggunakan analisis teori simbiosis mutualis Al-ghozali dengan bercermin pada teori modal budaya dari Bourdieu. Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa pertama figur kiyai Maimun Zubair dapat memposisikan perannya pada struktur dan sebagai agen. Kedua K.H. Maimun memiliki kharismanya di tengah masyarakat meskipun terjun dalam dunia politik. Dengan kharisma yang masih tetap terjaga serta keteguhan kiyai dalam urusan agama dan negara harus ditempatkan pada posisinya serta dengan kerjasama yang baik dan seimbang, sehingga dapat meminimalisir konflik dalam partai politik.

Kata Kunci: *cultural capital, kharisma, kiai, partai politik, wacana.*

A. PENDAHULUAN

Krisis tokoh yang ideal merupakan salah satu masalah yang cukup serius dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Kondisi negara yang semakin lemah, baik sistem pemerintahan maupun kelembagaannya menjadikan masyarakat semakin apatis terhadap cara kerja para birokrat ataupun pemimpin rakyat lainnya. Banyak tokoh yang menggerakkan dirinya menuju kursi jabatan atas nama rakyat. Tetapi, tidak sedikit juga yang lalai terhadap amanat yang telah mereka emban. Dalam sistem demokrasi, partisipasi masyarakat luas menjadi tujuan yang paling utama dibandingkan dengan yang lain (Jayadi, 2016). Terdapat banyak hal yang dapat menjadi alasan seseorang dalam memutuskan pilihan politiknya. Tentunya modal sosial, budaya, dan ekonomi sangat berpengaruh dalam hal ini.

Menurut Bourdieu, seorang antropolog prancis yang telah menjadi teoretis utama dalam kajian-kajian kritis tentang praktik kultural menyatakan bahwa modal bukan hal-hal yang selalu berbentuk materi atau yang berhubungan dengan ekonomi. Akan tetapi, ada hal lain juga yang cukup berharga dan bisa dijadikan sebagai dasar dalam melakukan sesuatu, seperti budaya (Bourdieu, 2010). Fungsi budaya bisa dijadikan sebagai modal kultural yang justru lebih berpengaruh dibandingkan hanya sebatas modal ekonomi. Inilah yang kemudian disebut dengan *cultural capital*. Artinya, ada kebiasaan, nilai-nilai, tradisi atau budaya yang dipegang oleh masyarakat sehingga dipercaya dan diyakininya.

Potret masyarakat Jawa dikenal dengan masyarakat yang cukup taat akan kepercayaan religiusnya. Segala perilaku dan kegiatan sehari-hari senantiasa memperhatikan norma dan tradisi yang ada dalam komunitas atau masyarakatnya. Kiai dalam persepsi kaum Jawa merupakan sosok pribadi yang saleh, mempunyai kelebihan yang berbeda dengan masyarakat biasa pada umumnya. Terutama adanya anggapan bahwa kiai adalah sosok yang sangat dekat dengan Tuhan (Suprayogo, 2009: 2).

Kharisma yang dipancarkan seorang kiai seolah memberikan suatu kepercayaan bahwa tidak akan rugi jika dalam melakukan segala sesuatu berdasarkan petunjuk sang kiai. Konsep *barokah* yang ditimbulkan dari kiai tidak hanya dipercaya di kalangan para santrinya saja, tetapi juga menyebar dan melekat dalam diri masyarakat sekitarnya.

K.H. Maimun adalah seorang pendiri dan sekaligus pengasuh pondok pesantren Al-Anwar Sarang Rembang. Ia merupakan tokoh yang

berpengaruh di masyarakat. Pengaruh tersebut tidak sebatas dalam persoalan keagamaan, tetapi juga persoalan politik. Salah satu strategi yang banyak dilakukan oleh para kandidat ketika ingin melancarkan misi politiknya yaitu berkunjung ke kediaman para tokoh agama terkemuka termasuk K.H. Maimun. Selain itu, di usianya yang semakin rentan, K.H. Maimun juga sering diminta untuk memberikan nasihat politik maupun rekomendasi moral dalam setiap konflik politik.

Adanya peran ganda yang diemban oleh K.H. Maimun ini yang kemudian menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian. Berdasarkan pengamatan terhadap realita yang ada, seorang tokoh agama jika sudah terlibat ke dalam dunia politik, maka tidak sedikit dari mereka yang kemudian memarginalkan urusannya sebagai tokoh agama di tengah masyarakat. Jadi, tidak heran jika kepercayaan masyarakat mulai bergeser bahkan tidak mempercayai kharisma dari sosok yang sebelumnya sangat mereka banggakan (Turmudi, 2003:332).

Berbeda dengan ketokohan yang dibawa oleh pribadi K.H. Maimun berkenaan dengan pengaruhnya terhadap masyarakat yang sepertinya sulit untuk pudar. Terdapat *cultural capital* dan kharisma dalam pribadi K.H. Maimun yang belum tentu dimiliki oleh para tokoh agama lainnya. Sehingga, ketika sang kiai ini terjun dalam politik praktis akan mendapatkan respons yang berbeda dari kiai atau orang lain pada umumnya. Penelitian ini akan mengkaji *cultural capital* dan kharisma kiai dalam wacana partai politik PPP di Indonesia.

Biografi K.H. Maimun Zubair

K.H. Maimun adalah putra dari pasangan suami istri bernama kiai Zubair Dahlan dan Nyai Mahmudah binti kiai Ahmad bin Syu'aib. Menikah dengan Hj. Heni Maryam (istri ketiga) dari Kudus yang sampai saat ini masih berjuang menemani dan memimpin pesantren bersama. Pendidikan diperoleh dari pendidikan non formal, sejak kecil memulai pendidikan agama bersama ulama di daerah Sarang. Lalu memulai hijrah studinya ke pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur pada tahun 1945-1949 M. Setelah beberapa tahun kemudian, pada 1949 M ia memutuskan kembali ke kampung halaman untuk mengabdikan dan mengamalkan ilmu yang telah diperoleh. Pada tahun 1369 H (1950 M), kembali menimba ilmu ke Makkah beserta kakeknya selama sekitar 2

tahun. Ia banyak belajar dengan ulama *Al-haromain* dan berpengaruh salah satunya yaitu Sayyid Alawi al-Maliki (Ulum, 2014:41).

K.H. Maimun juga merupakan sosok yang aktif dalam berorganisasi di tengah masyarakat, tercatat beberapa jabatan yang pernah diraih oleh K.H. Maimun di antaranya yaitu: Mudir 'Am madrasah Ghazaliyah dari awal berdirinya hingga sekarang, Nadhir masjid Jami' Sarang, Ketua badan pertolongan atau sosial kota Sarang selama delapan tahun, tepatnya dari tahun 1967-1975 M (1387-1395 H), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat II Rembang, mulai tahun 1971-1978 M (1391-1399 H), Anggota MPR RI dari utusan Jawa Tengah pada tahun 1987-1999 M, Ketua Syuriah NU Provinsi Jawa Tengah 1985-1990 M, Ketua Jam'iyah Thariqah NU hasil kongres ke-tujuh di pondok Pesantren K.H. Muslih Mranggen Demak sampai muktamar berikutnya yang berlangsung di kota Pekalongan pada tahun 2000 M, sebagai ketua MPP. PPP pada tahun 1995-1999 M, sebagai Ketua Majelis Syari'ah PPP mulai dari tahun 2004 hingga sekarang, Menjadi figur utama dalam Majelis Ijtima' Ulama Nusantara kedua di Malaysia utusan Indonesia pada tahun 2007 M. Pada tahun 2010 M menjadi anggota ICIS (*International Conference of Islamic Scholars*) dari Indonesia yang diutus ke Uzbekistan.

Selain aktif mengajar, K.H. Maimun juga banyak menghasilkan karya di antaranya yaitu: *Al-ulama Mujaddidun Rahimahullahu Ta'ala wa Mujal Tajdidihim Wa ijtiyadihim* tentang perkembangan Islam yang sangat identik dengan perkembangan para ulama dan mujaddid, Dalam karya ini, K.H. Maimun menjelaskan tentang para mujaddid berdasarkan urutan waktu, serta pembahasan tentang *masailul fihiyyah* kontemporer yang memerlukan ijtihad baru. Ada kitab *Taqrirat* (penetapan hukum mengenai suatu masalah). Kitab ini meliputi *Jawharut Tauhid*, *Ba'dul 'Amali* dan lain-lain. Karya ini adalah syarah atau penjelas dari semua nadzam tentang ajaran-ajaran tauhid. Semua karya ini hanya dibukukan untuk kalangan pesantren Al-Anwar saja. Ada karangan dengan judul *Masalakuttanasuki*, kitab ini banyak bercerita tentang ajaran tasawuf atau cara memurnikan hati. Terdapat beberapa ijazah yang ditulis oleh K.H. Maimun dalam kitab ini di antaranya yaitu *talqin* yang silsilah sanadnya bisa menyambung sampai Sayyidina Ali RA. Ada *Nushushul Akhyar*, kitab ini berawal dari maraknya perbedaan di Indonesia, terutama dari kalangan NU dan Muhamadiyah ketika menentukan waktu puasa maupun lebaran. Sehingga, dalam karya ini K.H. Maimun banyak mengurai penjelasan tentang *itsbatusschaum*,

ra'yatul hilal, dan lain-lain yang berhubungan dengan suatu penetapan. Dalam hal ini, K.H. Maimun selalu menunjukkan kecondongannya pada pemerintah. Ada *Tarajim Masyayikh al-ma'ahd ad-dinyyah Bisarang al-Qudama'*, dalam karya ini, dijelaskan secara detail oleh K.H. Maimun tentang biografi para *masyayikh al-qudama'* (para ulama pendahulu) yang berjasa dan berpengaruh di daerah Sarang.

Cultural Capital sebagai Arena Kekuatan

Keinginan berkuasa atau menguasai adalah hal yang sangat wajar dalam setiap naluri manusia sebagai *zoon politicum*. Dalam hubungannya dengan kekuasaan tersebut, Rasulullah telah mengingatkan kepada umatnya agar tidak sekali-kali mengemis maupun meminta suatu jabatan. Sebab, jabatan adalah urusan amanah yang harus di pertanggungjawabkan bukan hanya sekedar di dunia saja, tetapi juga sampai akhirat. Pada dasarnya tidak ada kekuasaan yang tetap stabil, baik kekuasaan itu dicapai dengan cara pemaksaan secara fisik maupun melalui kelecikan semata (Turner, 1974: 37). Hal ini mengisyaratkan bahwa jabatan adalah satu urusan yang memerlukan banyak modal. Ada tiga macam modal yang di ungkap oleh Bourdieu yakni modal ekonomi, modal budaya dan modal sosial.

Sama halnya dengan aktivitas ekonomi, selain memerlukan uang cukup, keterampilan berbisnis dan mengelola usaha yang baik adalah modal yang sangat penting. Dalam ranah politik pun, modal juga turut mempengaruhi publik. Salah satunya yaitu modal yang disebut dengan *Cultural capital*. Yakni, adanya nilai-nilai, tradisi atau kebiasaan yang telah dipegang dan dipercayai oleh masyarakat. Dalam hal ini, dapat dikatakan sebagai *habitus*, yaitu sebuah produk dari hasil sejarah yang dipegang oleh masyarakat. Masyarakat Jawa percaya bahwa kiai merupakan tokoh agama yang berkedudukan seperti ulama yang sudah seharusnya dihormati. Kondisi ini terjadi dalam ranah kultural yaitu ruang interaksi antara agen dan struktur yang dipengaruhi oleh beberapa simbol baik dalam bidang ekonomi, budaya, sosial, pendidikan maupun politik. Dalam hal ini, yang lebih mendominasi adalah simbol budaya. Sebab berbentuk pengetahuan, kode internal atau akuisisi kognitif yang melengkapi agen sosial (manusia) (Turner, 1974: 72). Simbol-simbol budaya tersebut antara lain yaitu:

Kharisma Kiai

Dalam sosiologi Weber dijelaskan bahwa kekuasaan hanya akan ditaati apabila ada beberapa alasan yang sah yang mendukung atas kekuasaan tersebut. *Pertama*, melalui dominasi hukum. *Kedua*, dominasi tradisional. *Ketiga*, dominasi kharismatik (Turner, 1974:37). Ciri yang mendominasi adanya suatu kharismatik di antaranya yaitu adanya ketaatan bukan melalui tradisi atau peraturan-peraturan, akan tetapi melalui kepercayaan terhadap seseorang yang dianggap suci dan berkekuatan luar biasa. Dalam pandangan masyarakat Jawa, salah satu sosok yang dianggap suci adalah kiai. Secara kultural, kiai memiliki wibawa yang berbeda dengan masyarakat biasanya. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Dhofier, kiai seolah menjadi raja kecil yang harus ditaati segala perintahnya (Muhtadi, 2004:42). Karena adanya aura sakralitas yang ditimbulkan oleh seorang kiai dalam kaca mata masyarakat awam sehingga membuat kharisma itu dengan sendirinya mengubah pola pikir masyarakat dengan cara mengikuti jalan kiai (Azra, 2002:75). Apalagi, ketaatan tersebut telah didukung dan dilegitimasi oleh nilai-nilai agama.

Kealiman dan Kepercayaan Makna Barokah

Pandangan masyarakat Jawa, terhadap sosok kiai sebagian masih dipengaruhi kuat oleh keyakinan mereka terhadap kata *barokah*. Ketika seorang kiai menganjurkan untuk melakukan sesuatu, maka masyarakat akan cenderung melaksanakannya. Ada efek *barokah* yang mereka percayai di balik seruan seorang kiai. Nilai ini yang dipegang oleh masyarakat, kemudian dipraktikan dan akhirnya membentuk sebuah *habitus*. Meskipun kepercayaan ini tidak berlaku di seluruh lapisan masyarakat Jawa, namun ada sebagian dari kalangan masyarakat tertentu yang memang masih kuat. Salah satunya yaitu yang terjadi di masyarakat sekitar lingkungan K.H. Maimun. Sebagian dari masyarakat tersebut mengakui sangat simpati terhadap figur K.H. Maimun. Simpati ini melahirkan berbagai perilaku akibat kealiman dan kepercayaan terhadap makna *barokah*. Sebagai contoh, tidak sedikit dari masyarakat lingkungan K.H. Maimun yang pengecatan rumahnya menggunakan warna hijau. Ini terjadi karena mengikuti K.H. Maimun yang suka dengan warna hijau. Selain itu, ada juga warga yang mengakui bahwa dagangan sembakonya selalu laris tiap kali ada rutinitas pengajian yang diselenggarakan oleh K.H. Maimun. Kadang-kadang, masyarakat memilih

salah satu kandidat juga akibat adanya foto figur K.H. Maimun dalam spanduk kandidat tersebut. Hal ini menandakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kiai masih begitu kental.

Kesederhanaan atau Kezuhudan K.H. Maimun

Salah satu yang menjadi alasan masyarakat paling segan dengan figur K.H. Maimun adalah karena sifat kesederhanaannya. Hal ini bisa diketahui dari cara K.H. Maimun yang selalu membedakan tempat dalam menyimpan uang. Dari hasil ceramah, politik maupun penghasilan yang lain. Dalam kajian *Ihya'ulumuddin* pun K.H. Maimun tidak pernah memeriahkan khatamannya. Hal ini dilakukan dalam rangka benar-benar ingin menjaga. Inilah yang menjadikan masyarakat begitu segan dengannya.

B. PEMBAHASAN

Politik K.H. Maimun Zubair Konteks Keislaman dan Keindonesiaan

Manusia adalah *zoon politicum* yang segala tindakan dan perilakunya tidak bisa lepas dari persoalan politik. Dengan adanya kecenderungan politik, manusia bisa mengubah relasi biasa menjadi relasi yang luar biasa. Dalam hubungannya dengan sesama manusia, apabila tidak ada yang mengontrol maka sangat mungkin akan terjadi konflik. Sebab, politik selalu berhubungan dengan kepentingan, dan setiap individu senantiasa mempertahankan kepentingan masing-masing. Demi menjaga kestabilan hubungan tersebut, maka sangat perlu bahkan harus menghadirkan sosok pemimpin. Dalam konteks Islam, pemimpin dapat disebut sebagai *ulil amri* yang keberadaannya harus dijunjung tinggi dan ditaati. Sebagaimana disinggung dalam al-Qur'an surah An-nisa ayat (4):59.

Dalam kehidupan masyarakat, terutama lingkungan masyarakat Jawa, persoalan kepemimpinan lebih banyak diserahkan kepada golongan kiai. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh yang luar biasa dalam pribadi kiai. Salah satunya yaitu faktor teologis yang memposisikan kiai atau bisa disebut ulama sebagai orang yang mewarisi Nabi. Ia menjadi salah satu pihak yang memiliki wewenang untuk menafsir pesan Tuhan tentang berbagai aspek kehidupan (Muhtadi, 2004:39).

Kepemimpinan yang dilakukan oleh tokoh K.H. Maimun baik perannya sebagai tokoh panutan di masyarakat maupun di partai politik, telah mengedepankan nilai-nilai dan prinsip yang diajarkan oleh Islam. Ia selalu berusaha untuk mengoptimalkan amanahnya baik sebagai pemimpin agama maupun sebagai utusan pemerintah. Baginya, urusan politikpun menjadi hal yang sangat penting kaitannya dengan bukti cinta kepada tanah air. Dalam menjalankan kiprah di bidang pemerintahan, K.H. Maimun menganggap tugas tersebut adalah salah satu bentuk pengabdian dalam melaksanakan ajaran Islam. Dengan berpedoman pada al-qur'an surah Ali Imron: (3): 104.

Bagi K.H. Maimun, lafal "*Minkum*" yang artinya di antara kamu memberikan isyarat bahwa hendaknya ada seseorang di antara kamu maupun kelompok yang berjuang dengan gigih menerapkan *amar ma'ruf nahi munkar*. K.H. Maimun menilai bahwa partai PPP sebagai satu-satunya partai yang memegang prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Hal ini dibuktikan dengan adanya ideologi PPP yang senantiasa mendukung umat Islam secara keseluruhan. Bagi K.H. Maimun Zubair, berpolitik harus diniatkan sebagai bentuk pengabdian terhadap agama dan negara.

Hal ini sangat sejalan dengan pemikiran Imam Ghazali dalam karyanya *At-Tibr Al-Masbuk Fi Nasihat Al-mulk* yang membagi wilayah kepemimpinan menjadi dua kategori. *Pertama*, pemimpin dari golongan *umara'* (pemerintah) yang diwakilkan oleh para *wazir* dan *imam*. *Kedua*, dari *ulama* (yang diwakilkan dari golongan kaum *fuqaha'* atau cendekiawan dan *hukama'* (para ahli hikmah). Dari kategori ini, maka jelas bahwa keberadaan pemimpin harus mampu melindungi umatnya dalam hal apapun. Harus ada keseimbangan baik antara kepemimpinan yang berhubungan dengan hal kesejahteraan maupun yang berhubungan dengan spiritual. Hal ini bisa bercermin dengan dalil al-qur'an surah Hud (11): 93. Ayat dalam surah tersebut menjelaskan bahwa manusia diperintah untuk berbuat sesuai kemampuan. Hal ini juga memberikan isyarat bahwa bekerja atau melakukan sesuatu harus berdasarkan pada tempatnya masing-masing. Artinya, tidak melakukan hal yang sifatnya menjadikan fungsi tumpang tindih. Dalam kaitannya dengan agama dan politik pun demikian, harus ada keseimbangan.

Imam Ghazali menegaskan bahwa hubungan antara urusan kenegaraan dengan urusan spiritual bagaikan saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya bagaikan sisi mata uang logam yang berbeda, namun tidak bisa dipisahkan. Pemimpin harus bisa

memposisikan antara otoritas negara dan otoritas agama agar bisa berjalan seimbang atau yang sering disebut dengan hubungan *simbiosis mutualis* (saling menguntungkan). Hal ini dimaksudkan sebab, tujuan berdirinya negara adalah tidak semata-mata yang berhubungan dengan kepentingan duniawi saja, kepentingan agama juga perlu diperhatikan. Negara adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi sarana agar syariat itu bisa ditegakkan. Sebab, tujuan syariat yang paling mendasar juga tidak lain adalah masalah kemaslahatan umat.

Kepemimpinan dalam konteks keindonesiaan lebih identik dengan kepemimpinan politik. Sebab politisi atau pejabat negara adalah orang yang memegang amanat dari rakyat untuk menjalankan tugas negara. Sebagai wakil rakyat, mereka mempunyai kewajiban melindungi rakyat dari segala keterpurukan baik dalam hal sosial, ekonomi, budaya maupun pendidikan. Kepemimpinan politik dapat dipahami melalui tiga perspektif. *Pertama*, kepemimpinan sebagai pola perilaku. *Kedua*, kepemimpinan sebagai kualitas personal. *Ketiga*, kepemimpinan sebagai nilai politik (Alfian, 2009:19). Sebagai pola perilaku, kepemimpinan erat sekali dengan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam konteks Indonesia, kepemimpinan sebagai pola perilaku perlu didukung oleh adanya legitimasi agar seseorang bersedia menjalankan perintah. Berbeda dengan kepemimpinan sebagai kualitas personal, kepemimpinan ini lebih mengarah pada suatu kharisma yang diyakini masyarakat terhadap diri personal. Sedangkan kepemimpinan politik lebih berkaitan dengan kemampuan untuk menggerakkan orang lain dengan otoritas moral maupun ideologi identitas (Alfian, 2009:19). Dengan adanya perspektif demikian, maka konteks kepemimpinan di Indonesia dapat dilihat dari dua kategori yaitu politisi dan negarawan.

Apabila merujuk pada pandangan Imam Ghazali, maka ketokohan K.H. Maimun masuk dalam kategori ulama. Artinya, orang yang ahli dalam bidang fiqh dan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari tugasnya sebagai pengasuh pesantren, tempat di mana orang belajar berbagai ilmu agama terutama yang berhubungan dengan hukum Islam. Selain itu, ia juga masuk dalam kategori *umara'*. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatannya dalam urusan pemerintahan melalui partai yaitu sebagai Dewan Syura.

Dualisme kepemimpinan tersebut dapat dijadikan pelajaran bahwa dalam melaksanakan tugas tertentu, seseorang harus mampu bekerja menyesuaikan bidang masing-masing. Urusan pemerintahan tidak boleh lepas tangan dari urusan keagamaan. Begitu juga sebaliknya, urusan keagamaan membutuhkan pemerintahan untuk menegakkan prinsip-prinsip ajarannya. Ini yang menjadi alasan K.H. Maimun bersedia aktif dalam kehidupan politik praktis dengan kharisma yang sulit untuk dihilangkan. Sebab, orientasi politiknya bukan untuk kedudukan, tetapi sebuah panggilan untuk melaksanakan ajaran agama sebagai manusia yang diberi kepercayaan untuk menciptakan keteraturan bukan kerusakan. Susilo Bambang Yudhoyono sendiri mengakui tidak bisa menjalankan pemerintahannya selama dua periode tanpa bantuan fatwa K.H. Maimun.

Kritik terhadap K.H. Maimun Zubair

Keberadaan K.H. Maimun sebagai seorang tokoh agama yang memiliki banyak massa dari berbagai daerah, menjadi daya tarik tersendiri bagi politisi-politisi yang ingin memenangkan misinya. Apalagi K.H. Maimun pernah berkata bahwa: *"Seburuk-buruk ulama adalah mereka yang sibuk mendatangi pemerintah atau penguasa, dan sebaik-baiknya pemerintah atau penguasa adalah mereka yang mendatangi ulama."* Dengan adanya pernyataan tersebut, kedatangan para politisi secara otomatis mendapatkan legitimasi dari K.H. Maimun. Sehingga, niat kampanye mereka dapat termanifestasi oleh misi *taqarrub ilallah* melalui para ulama. Inilah yang kemudian banyak dimanfaatkan oleh para preman politik. Namun demikian, masyarakat saat ini jauh lebih cerdas. Sehingga, tidak semua yang berkunjung dan meminta restu K.H. Maimun dapat memenangkan kompetisinya. K.H. Maimun tidak mampu secara langsung membawa keberuntungan bagi para politisi yang ingin memenangkan misi tertentu. Kekalahan menjadi hal yang wajar, meskipun telah dibantu putra K.H. Maimun dalam menghimbau masyarakat maupun santri untuk memilih.

Sebagai Ketua Majelis Syariah, tentunya K.H. Maimun memiliki tanggungjawab besar dalam menyelesaikan segala konflik yang terjadi. Akan tetapi, fatwa yang ia keluarkan tidak mampu menutup berbagai konflik yang ada. Sebaliknya, justru menjadi alat manifestasi kepentingan elite politik tertentu.

C. KESIMPULAN

K.H. Maimun adalah tokoh agama yang kharismatik, alim, *zuhud*, dan memiliki nasab yang terhormat. Melalui *cultural capital* untuk mengawali karir politiknya sebagai bentuk pengabdian terhadap agama dan negara. K.H. Maimun Zubair dalam dunia politik didorong dengan adanya *cultural capital* dari masyarakat, hingga mendapatkan posisi kuat dan sentral pada PPP sebagai Ketua Majelis Syariah. Memegang otoritas paling tinggi serta berwenang penuh dalam menentukan arah kebijakan partai sebagai penjaga moral dan mampu meminimalisir dinamika konflik PPP. Dengan kharisma yang masih tetap terjaga serta keteguhan kiyai dalam memegang ajaran Al-ghazali yaitu urusan agama dan negara harus ditempatkan pada posisinya masing-masing, dengan kerjasama yang baik dan seimbang, sehingga dapat meminimalisir konflik dalam partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, A. 2009. *Menjadi Pemimpin Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Azra, A. 2002. *Reposisi Agama dan Negara*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Bourdieu, P. 2010. *Arena Produksi Kultural, Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Jayadi, S. 2016. *Beragama untuk kemanusiaan dan Kebangsaan: Esai-esai Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Muhtadi, A. S. 2004. *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama, Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*. Jakarta: LP3ES.
- Saeful, M. A. 2004. *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama, Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*. Jakarta: LP3ES.
- Suprayogo, I. 2009. *Kyai dan Politik, Membaca Citra Politik Kyai*. Malang: UIN MALANG Press.
- Turmudi, E. 2003. *Perselingkuhan Kyai dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LkiS.
- Turner, B. S. 1984. *Sosiologi Islam, Suatu Telaah Analitis atas Tesa Sosiologi Weber*. Jakarta: Rajawali.
- Ulum, A. 2014. *Syaikhuna wa Ustratuhu*, Rembang: Lembaga Pendidikan Muhadlarah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sumber lain:

- Wawancara dengan Mubasyir, tokoh agama di desa Karangmangu, Sarang Rembang 2016.
- Wawancara dengan Abdullah Faiz, santri di Pondok Al-anwar Sarang Rembang 2016.
- Wawancara dengan Majid Kamil MZ, Putra K.H. Maimun, di Pesantren Al-Anwar I, Karangmangu, Sarang, Rembang 2016.
- Wawancara dengan Majid Kamil, di Desa Karangmangu Sarang Rembang 2016.